

## **Strategi Pengarusutamaan Gender Melalui Penganggaran Responsif Gender Pada Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau**

**Oleh :  
Sekha Dwi Yanti  
160563201088**

### **ABSTRAK**

Responsif gender adalah aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol serta menerima manfaat pembangunan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Agar pembangunan responsif gender dapat dirasakan secara merata dan adil dengan demikian Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender ini masih banyak kendala dan kekurangan, maka dari itu perlu adanya dukungan dari pihak-pihak gender di Kantor Satpol PP Provinsi Kepri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengarusutamaan gender melalui penganggaran responsif gender pada Satpol PP Provinsi Kepri. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dalam strategi pengarusutamaan gender melalui penganggaran responsif gender pada Satpol PP Provinsi Kepri ini peneliti menggunakan empat indikator dari teori Professor Dr. Vincent Gaspersz. Hasil penelitian ini dilihat dari dimensi misi belum mencapai target dalam pelaksanaannya karena ada kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Dari dimensi prinsip, bagaimana pihak-pihak terkait menjalankan program/kegiatan belum merata. Dari dimensi sasaran, dari program dan kegiatan responsif gender ini kurang terlaksanakan dengan baik. Dari dimensi tujuan, dengan adanya penganggaran responsif gender ini sangat membantu dalam kesetaraan dan keadilan menikmati hasil pembangunan.

**Kata kunci : Strategi, Anggaran, Responsif Gender.**

***Gender Mainstreaming Strategy through Gender Responsive Budgeting at the  
Satpol PP in the Kepulauan Riau Province***

***By :  
Sekha Dwi Yanti  
1600563201088***

***ABSTRACT***

*Gender responsiveness is an aspect that pays attention to the condition of the gap between women and men in access, participation, control and receiving development benefits whose aim is to realize gender equality and justice. In order for gender responsive development to be felt equally and fairly, the Tanjungpinang City Government issued Regional Regulation No 2 of 2016 concerning Gender Mainstreaming. In the implementation of Gender mainstreaming there are still many obstacles and shortcomings, therefore there is a need for support from gender parties at the Riau Islands Province Satpol PP Office. This study aims to determine how the strategy of gender mainstreaming through gender responsive budgeting in the Satpol PP of Riau Islands Province. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Technical analysis of data in this study using triangulation techniques. In the strategy of gender mainstreaming through gender responsive budgeting at the Satpol PP of Riau Islands Province, the researcher uses four indicators from Professor Dr's theory Vincent Gaspersz. The results of this study are seen from the mission dimension that has not reached the target in its implementation because there are activities that have not been carried out optimally. From the principle dimension, how the related parties carry out programs/activities has not been evenly distributed. From the target dimension, these gender responsive programs and activities have not been implemented properly. From the objective dimension, the existence of gender responsive budgeting is very helpful in equality and justice in enjoying the results of development.*

***Keywords : Strategy, Gender Responsive, Budgeting.***